

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perijinan  
Kabupaten Bantul  
Nomor : 049 TH. 2016  
Tanggal : 17 November 2016

A. PENDAHULUAN

Dinas Perijinan sebagai salah satu SKPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya dibidang perizinan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Praktik / Kerja Bidan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A. Proses Penyampaian Pelayanan (service delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Persyaratan Permohonan Baru</b></p> <p>Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;</li><li>2. foto copy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi;</li><li>3. foto copy surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li><li>4. foto copy surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;</li><li>5. foto copy sertifikat pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) atau pelatihan yang sejenis;</li><li>6. surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan APN atau pelatihan yang sejenis bagi yang belum pernah mengikuti, paling lambat 1 tahun setelah izin diterbitkan;</li><li>7. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;</li><li>8. foto copy surat perjanjian kerjasama pengelolaan limbah jika pengelolaan limbahnya dilaksanakan oleh pihak ketiga (untuk SIPB);</li><li>9. hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku (untuk SIPB);</li><li>10. rekomendasi Dinas Kesehatan; dan</li><li>11. rekomendasi dari organisasi profesi setempat.</li></ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>PROSEDUR PELAYANAN IZIN</b> <b>LICENSE SERVICES PROCEDURE</b></p>

		<p><b>Keterangan bagan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mendaftarkan berkas permohonan ke Dinas Perijinan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. Petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon.</li><li>2. Pemeriksaan berkas permohonan.</li><li>3a. Jika berkas permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan ditolak dengan diterbitkan <b>surat penolakan</b> dan pemberitahuan ke pemohon melalui SMS Gateway.</li><li>3b. Jika berkas/dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai ditetapkan Surat Izin Praktik/Kerja Bidan oleh Kepala Dinas bagi permohonan Surat Izin Kerja Izin Praktik/Kerja Bidan baru.</li><li>4. Pemohon datang ke Dinas Perijinan setelah mendapat SMS pemberitahuan izin sudah selesai untuk mengambil izin.</li></ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 10 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut retribusi
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik/ Kerja Bidan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>❖ <b>Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Loker Pengaduan yang ada di ruang Customer Service (didepan).</li><li>2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perijinan.</li><li>3. E-mail : perijinan@bantulkab.go.id</li><li>4. Telepon : (0274) 367867. SMS : 08112503088, dengan ketik : <b>LAPOR [SPASI] ISI PENGADUAN</b> Fax : (0274) 367866</li><li>5. Kotak saran/pengaduan.</li><li>6. Buku Pengaduan</li><li>7. Touch screen yang ada di Dinas Perijinan.</li><li>8. Formulir survey IKM.</li><li>9. Sub domain perizinan (<i>Website</i>): <a href="http://perijinan.bantulkab.go.id/">http://perijinan.bantulkab.go.id/</a></li></ol> <p>❖ <b>Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Cek administrasi;</li><li>b) Cek lapangan (bila diperlukan);</li><li>c) Koordinasi internal;</li><li>d) Koordinasi instansi terkait (bila diperlukan);</li><li>e) Koordinasi dengan pihak pengadu dan yang diadukan</li></ol> <p><b>Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</b></p>
<b>C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi :</b>		
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bantul yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011;



		<p>14 (empat belas) orang.</p> <p><b><u>Keterangan:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.</li> </ul>
12.	Jaminan pelayanan	<p>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</p> <p>b. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.</p> <p>c. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui <i>SMS Gateway</i>.</p>
13.	Jaminan keamanan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Izin Izin Kerja / Praktik Bidan dicetak dengan menggunakan kertas <i>BC</i> ( Brief Card ) dan berlambang Kabupaten Bantul;</li> <li>• Surat Izin Izin Kerja / Praktik Bidan dibubuhi 3 paraf, yaitu Kepala Seksi Penetapan, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan, serta ditandatangani Kepala Dinas dan dicap basah.</li> <li>• Penomoran Surat Izin Izin Kerja / Praktik Bidan diberikan dengan kode khusus dan otomatis melalui SIM perizinan</li> </ul>
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemohon yang mengambil izin dapat diberikan kuesioner IKM untuk diisi.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi rutin tiap 6 (enam) bulan.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ol> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>
15.	Masa berlaku Izin	<p>1. Izin Kerja Izin Kerja / Praktik Bidan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang Surat Tanda Registrasi (STR) masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin serta dapat diperpanjang.</p> <p>2. Perpanjangan Izin harus diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.</p>
16.	Waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</li> <li>• Jumat : 08.00 – 14.00 WIB</li> </ul>